



Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Amanda Zhafiera Maharani

Politeknik Negeri Jember

Angelin Sherlina Annundi

Politeknik Negeri Jember

Fina Widia Wulansari

Politeknik Negeri Jember

Indah Aprilia Susanti

Politeknik Negeri Jember

Oryza Ardhiarisca

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: zhafieraamanda051@gmail.com

Abstract. Capital expenditures and personnel expenditures reflect unique economic and public administration dynamics in the provincial context. Both have a vital role in supporting infrastructure development, public services and inclusive economic growth, especially in West Java Province. The aim of this research is to test whether capital expenditure and employee expenditure have an effect on Regional Original Income. This research uses a quantitative research approach. The data source used in this research is a secondary data source originating from the Regional Financial Information System (SIKD) which is published via the Directorate General of Taxes (DJP) website. The results of this research show that the variables of employee expenditure and capital expenditure have a significant positive effect on Regional Original Income.

Keywords: Capital Expenditures, Employee Expenditures, Regional Original Income.

Abstrak. Belanja modal dan belanja pegawai mencerminkan dinamika ekonomi dan administrasi publik yang unik dalam konteks provinsi. Keduanya memiliki peran yang vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama pada Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dipublikasikan melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP). Proses olah data dilakukan melalui Aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Belanja Modal, Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Belanja modal dan belanja pegawai mencerminkan dinamika ekonomi dan administrasi publik yang unik dalam konteks provinsi. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang signifikan dan keragaman sosial-budaya yang kaya, Jawa Barat memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Namun, sebaliknya provinsi ini terus berkembang, tantangan dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan juga semakin meningkat.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana. Menurut Wa Ariadi, (39,2021) ketika uang dibelanjakan untuk membeli, membangun, atau mengembangkan aset tetap material – seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, sistem irigasi, dan aset tetap lainnya – yang akan digunakan untuk tujuan

pemerintah selama lebih dari satu tahun, itu disebut sebagai pengeluaran modal. Belanja modal tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, tetapi juga investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi. Dengan begitu, Belanja modal dapat diartikan juga pengeluaran oleh pemerintah daerah yang melampaui satu tahun fiskal, meningkatkan sumber daya wilayah, dan berkontribusi pada pengeluaran reguler seperti pemeliharaan untuk kategori pengeluar administrasi umum (Halim, 2004:73).

Salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja distrik yang selalu menarik untuk diselidiki adalah pengeluaran personil, selain investasi modal. Menurut Ariadi, W., dan Surjandari, R., pembelian yang dilakukan oleh pejabat adalah setiap biaya yang timbul oleh pemerintah Negara atau Wilayah untuk tujuan mendanai pembayaran yang dilakukan kepada pensiunan, TNI/Polri, dan pejabat negara sipil sebagai imbalan atas prestasi mereka dalam pekerjaan yang telah selesai (2020). Pengeluaran staf dikatakan sebagai salah satu alasan untuk dampak fly-paper pada pemerintah setempat karena pengeluaran ditunjukkan untuk menyerap lebih banyak uang transfer pemerintah pusat. Menurut Burhanudin (2012), besarnya dana pegawai yang dibelanjakan untuk belanja pemerintah daerah terus meningkat, dan hal ini tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masih belum cukup untuk mengurangi belanja pemerintah daerah. Penelitian Ryanda Saputra (2014) menyatakan bahwa belanja modal mempengaruhi pendapatan riil masyarakat.

Belanja pegawai yang mencakup gaji, tunjangan, dan biaya administratif untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan belanja modal, yang meliputi investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya, menjadi dua aspek utama dalam struktur anggaran pemerintah daerah di Jawa Barat. Keduanya memiliki peran yang vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship

Stewardship Theory merupakan teori fundamental yang diterapkan dalam penelitian ini. Teori ini menggabungkan perspektif sosiologi dan psikologi untuk menjelaskan perilaku manajer yang bertindak sebagai penatalayan atau steward. Dalam konteks ini, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai individu yang berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi demi kepentingan terbaik pemilik atau pemangku kepentingan. Donalson (1997) menyatakan bahwa teori stewardship berbeda dari teori agensi yang menganggap manajer cenderung mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, teori stewardship berasumsi bahwa manajer lebih mungkin untuk berperilaku altruistik dan pro-organisasi.

Menurut teori stewardship, manajer atau steward akan bertindak demi kepentingan terbaik kelompok secara keseluruhan. Mereka memahami bahwa keberhasilan organisasi secara langsung berdampak pada kesejahteraan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu, stewards cenderung berorientasi pada tujuan jangka panjang dan strategi yang berkelanjutan. Mereka melihat bahwa dengan memperjuangkan kepentingan terbaik organisasi, mereka juga akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif, di mana setiap anggota organisasi merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka.

Teori stewardship juga menekankan pentingnya kerjasama antara manajer dan pemilik, terutama ketika terjadi konflik kepentingan. Manajer yang bertindak sebagai steward akan berusaha untuk menjembatani perbedaan dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Mereka tidak melihat pemilik sebagai lawan, melainkan sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama. Ini berbeda dari pendekatan konfrontatif yang sering diasosiasikan dengan teori agensi, di mana kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek sering kali menjadi fokus utama.

Stewardship Theory percaya bahwa dengan menekankan pada upaya untuk mencapai tujuan organisasi, manajer akan lebih mungkin untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dan kepentingan bersama. Manajer yang bertindak sebagai steward akan melihat bahwa keberhasilan organisasi secara keseluruhan adalah cerminan dari kesuksesan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan bekerja keras untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Mereka memahami bahwa kesejahteraan jangka panjang organisasi lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Salah satu implikasi praktis dari teori stewardship adalah bahwa organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi manajer untuk bertindak sebagai steward. Ini bisa dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, pengakuan atas kontribusi mereka, serta insentif yang align dengan tujuan jangka panjang organisasi. Dengan menciptakan budaya organisasi yang kuat dan kooperatif, manajer akan merasa lebih termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Ini akan membantu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Teori stewardship menawarkan perspektif yang lebih optimis dan humanistik tentang perilaku manajer dalam organisasi. Dengan menganggap bahwa manajer memiliki kemampuan dan keinginan untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, teori ini memberikan dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan tujuan bersama, yang dapat membantu organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori stewardship dapat membantu menjelaskan bagaimana manajer dapat berperan sebagai steward yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penggunaan modal adalah penggunaan rencana keuangan untuk perolehan sumber daya yang menghasilkan manfaat dalam jangka waktu tertentu, misalnya sumber daya tetap. Penggunaan modal terdiri atas: (1) konsumsi lahan; (2) belanja peralatan dan perangkat keras; dan (3) penggunaan modal untuk perbaikan dan desain. (4) Mencari jalan, sistem pengairan dan organisasi; (4) Biaya sumber daya tetap lainnya; dan (5) Biaya sumber daya lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penggunaan modal adalah penerapan rencana keuangan yang bertujuan untuk perolehan dan pengelolaan sumber daya yang akan memberikan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan modal ini sangat penting dalam konteks pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya daerah, karena dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan membawa dampak positif dan berkelanjutan. Penggunaan modal yang tepat akan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Salah satu bentuk penggunaan modal adalah konsumsi lahan, yang mencakup pembelian atau penyewaan lahan untuk keperluan pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan ruang publik lainnya. Pengelolaan lahan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan wilayah yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, dengan

memanfaatkan lahan secara optimal, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari lahan tersebut, seperti pembangunan kawasan industri atau komersial yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Penggunaan modal juga meliputi belanja peralatan dan perangkat keras, yang mencakup pembelian mesin, alat berat, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah dan pelayanan publik. Investasi dalam peralatan dan perangkat keras ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Misalnya, pembelian alat kesehatan modern untuk rumah sakit daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, sedangkan investasi dalam teknologi informasi dapat meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan publik secara keseluruhan. Penggunaan modal juga dialokasikan untuk perbaikan dan desain, yang mencakup renovasi dan peningkatan infrastruktur yang sudah ada, serta pengembangan desain baru untuk proyek-proyek pembangunan. Ini termasuk perbaikan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan melakukan perbaikan dan desain yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Proyek desain yang inovatif juga dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan estetika serta fungsionalitas ruang publik.

Investasi dalam pembangunan jalan, sistem pengairan, dan organisasi merupakan komponen lain dari penggunaan modal yang sangat penting. Pembangunan jalan dan sistem pengairan yang baik akan mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri. Sementara itu, pengembangan organisasi mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjalankan program-program pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Pegawai

Mengenai penyusunan Rencana Kerja Rencana Belanja Pelayanan Negara/Organisasi, Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 21 Tahun 2004 menyatakan bahwa penggunaan perwakilan mencakup biaya remunerasi untuk kompensasi dan tunjangan serta gaji lain yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang memilih sesuai pengaturan pedoman hukum. Klasifikasi biaya pekerja ini mencakup biaya-biaya yang berhubungan dengan honorarium, tambahan waktu, tunjangan hari raya, serta kompensasi dan kiriman uang.

Pendapatan Asli Daerah

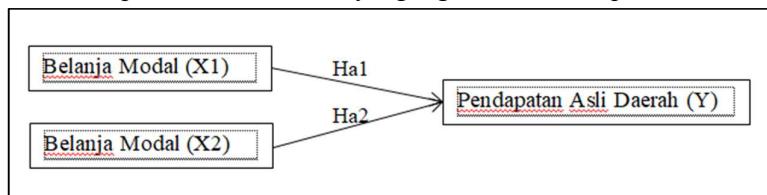
Pendapatan asli daerah adalah uang tunai yang diperoleh dan dikumpulkan oleh kabupaten sesuai peraturan dan pedoman setempat (Sanjaya dan Wijaya, 2009). Salah satu jenis gaji provinsi yang penting bagi pembangunan wilayah adalah gaji khas lingkungan. Gaji unik daerah adalah uang tunai yang berasal dari dalam kabupaten dan diterbitkan oleh pemerintah daerah (Arifin dkk, 2013). Sumber dari gaji teritorial adalah banyaknya eksekutif di tingkat provinsi, pungutan lokal, biaya provinsi dan tunjangan sah lainnya.

Salah satu bagian penting dalam Cushion adalah tugas daerah, yang mencakup penilaian yang dikumpulkan oleh negara bagian provinsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Contoh pajak daerah yang sering menjadi andalan adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Pajak-pajak ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, tetapi juga mendorong peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap sektor-sektor terkait, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya saing ekonomi daerah. Arifin dkk. (2013) menekankan bahwa pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu bentuk

pendapatan khas lingkungan yang esensial bagi keberlanjutan pembangunan wilayah. PAD juga mencakup retribusi daerah, yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat berasal dari berbagai layanan publik seperti pengelolaan pasar, pelayanan kesehatan, dan perizinan usaha. Pendapatan dari retribusi daerah membantu dalam pembiayaan operasional pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur lokal. Dengan demikian, pengelolaan retribusi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Sumber lain dari PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Selain itu, PAD juga bisa berasal dari pendapatan sah lainnya seperti dana hibah dan pendapatan dari kerjasama antar daerah. Keanekaragaman sumber PAD ini memberikan fleksibilitas dan kemandirian fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, PAD dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar berikut menampilkan model mental yang digunakan dalam penelitian ini:



Hipotesis dari kerangka pemikiran penelitian ini ialah sebagai berikut:

Ha1 : Belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha2 : Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam eksplorasi ini. Informasi penelitian berupa angka, dan wawasan digunakan untuk penyelidikan. Strategi kuantitatif adalah metodologi logis yang memandang realitas sebagai sesuatu yang dapat dikarakterisasi, nyata, dapat diamati, dan dapat diukur; interaksi variabel bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2008). Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sumber utama data sekunder penelitian ini yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Memanfaatkan program SPSS, pengolahan data dilakukan.

Strategi kuantitatif adalah metodologi yang logis dan terstruktur, yang memandang realitas sebagai sesuatu yang dapat dikarakterisasi, nyata, dapat diamati, dan dapat diukur. Menurut Sugiyono (2008), interaksi antar variabel dalam penelitian kuantitatif dianggap bersifat sebab akibat. Artinya, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi hasil berdasarkan variabel-variabel independen yang diukur. Pendekatan ini juga memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris, sehingga dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung atau menolak suatu teori.

Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sumber utama data sekunder dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari DJP bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIKD), yang menyediakan berbagai informasi keuangan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini sangat berharga karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang variabel-variabel keuangan yang sedang diteliti, seperti pendapatan pajak daerah dan belanja pemerintah. Dengan memanfaatkan data yang sudah ada, peneliti dapat menghemat waktu dan sumber daya yang biasanya diperlukan untuk mengumpulkan data primer.

Pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), yang merupakan salah satu perangkat lunak statistik yang paling populer dan banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. SPSS memungkinkan peneliti untuk melakukan berbagai analisis statistik, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis inferensial. Dalam konteks penelitian ini, SPSS digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari DJP dan SIKD, serta untuk melakukan uji statistik yang diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian. Penggunaan SPSS memastikan bahwa data diolah secara efisien dan akurat, serta hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan mudah.

Salah satu keunggulan metode kuantitatif adalah kemampuannya untuk memberikan hasil yang dapat digeneralisasi. Dengan menggunakan sampel yang representatif dan teknik analisis yang tepat, hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Selain itu, metode kuantitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, sehingga meningkatkan validitas internal penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

The screenshot shows the SPSS output for the One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. The results are as follows:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N	27	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000	
	Std. Deviation 1863.704788	
Most Extreme Differences	Absolute .140	
	Positive .140	
	Negative -.087	
Kolmogorov-Smirnov Z	.729	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.663	

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Data penelitian kami memenuhi syarat untuk uji regresi karena berdasarkan hasil uji normalitas nilai signifikansinya sebesar 0,663 atau > lebih besar dari 0,05 yang berarti nilai siswa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kemiripan atau tidaknya variabel-variabel tersebut. Tabel berikut menampilkan hasil pengujian belanja pegawai dan belanja modal. Untuk menentukan terjadi multikolinearitas atau tidak, kita dapat melihat ukuran kolinearitas yang ditunjukkan oleh nilai VIF dan nilai resistansi, dengan menggunakan aturan berikut: jika nilai VIF > 10 dan nilai vb < 0,1 , maka faktor bebas saat ini mempunyai multikolinearitas.

Dalam model regresi, uji multikolinearitas merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai hubungan linier yang kuat.

Multikolinearitas terjadi ketika setidaknya dua faktor bebas memiliki hubungan yang tinggi, sehingga sulit untuk mengisolasi dampaknya. individu dari setiap variabel terhadap variabel dependen. Kondisi ini dapat mengakibatkan estimasi parameter regresi menjadi tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi dan mengatasi multikolinearitas dalam analisis regresi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Dalam uji multikolinearitas, dua ukuran yang sering digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi (resistansi). VIF mengukur seberapa banyak variabilitas dari estimasi koefisien regresi meningkat karena adanya korelasi antar variabel independen. Nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan. Sebagai aturan umum, jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi di antara variabel-variabel independen. Di sisi lain, nilai toleransi adalah kebalikan dari VIF ($1/VIF$), dan nilai yang rendah (di bawah 0,1) juga mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas.

Tabel hasil pengujian belanja pegawai dan belanja modal dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antar kedua variabel tersebut. Jika nilai VIF untuk belanja pegawai dan belanja modal masing-masing lebih besar dari 10, ini menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, yang berarti adanya multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF berada di bawah 10, maka tidak ada indikasi kuat dari multikolinearitas di antara variabel-variabel ini. Selain itu, nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 juga memperkuat adanya multikolinearitas.

Mengatasi multikolinearitas dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satu cara adalah dengan mengeliminasi atau menggabungkan variabel independen yang memiliki korelasi tinggi. Cara lain adalah dengan menggunakan metode regresi yang robust terhadap multikolinearitas, seperti regresi ridge atau regresi principal component. Pendekatan ini dapat membantu memperbaiki masalah multikolinearitas dan menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

Penting untuk diingat bahwa mendeteksi dan mengatasi multikolinearitas bukan hanya untuk kepentingan teknis statistik, tetapi juga untuk memastikan bahwa model yang digunakan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermakna bagi pengambil keputusan. Dengan demikian, uji multikolinearitas merupakan langkah esensial dalam analisis data untuk memperoleh hasil yang valid dan interpretasi yang tepat dari hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah model regresi.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2267.333	.982 434				
	X1	2.218	.412	.810	.208	.361	2.772
	X2	.159	.227	.105	.698	.492	.361

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	
1	1	2.825	1.000	.02	.01	.01	
	2	.140	4.490	.60	.26	.01	
	3	.034	9.064	.38	.73	.99	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF variabel (X1) dan variabel (X2) adalah $2,772 < 10$ dan nilai tolerance value $0,361 > 0,01$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

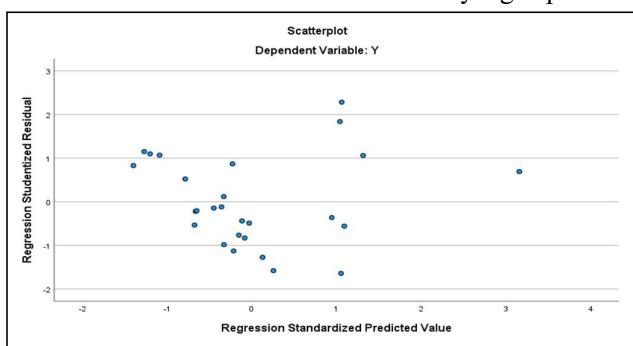
Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah variabilitas kesalahan (residu) dalam model regresi tetap konstan atau berubah-ubah untuk setiap nilai variabel independen. Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam variansi residu di seluruh rentang data yang diteliti, yang dapat mengakibatkan estimasi koefisien yang tidak efisien dan uji statistik yang tidak valid. Dalam model regresi yang ideal, residu seharusnya memiliki variansi yang sama, kondisi ini dikenal sebagai homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas membantu memastikan bahwa asumsi dasar dari analisis regresi terpenuhi sehingga hasil analisis dapat diandalkan.

Pengujian heteroskedastisitas sering dilakukan dengan menggunakan plot grafik scatter-plot yang menghubungkan sisa (residu) dengan nilai prediksi dari variabel independen (ZPRED). Jika plot grafik menunjukkan pola tertentu, seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit, atau bentuk lain yang teratur, maka ini adalah indikasi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik pada scatter-plot tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa homoskedastisitas terpenuhi. Uji ini penting karena keberadaan heteroskedastisitas dapat mengurangi validitas hasil regresi, menyebabkan kesalahan standard dari koefisien regresi menjadi tidak akurat dan meningkatkan risiko hasil yang bias.

Homoskedastisitas merupakan kondisi ideal dalam analisis regresi dimana variansi dari residu adalah konstan untuk semua observasi. Dengan homoskedastisitas, kita dapat lebih yakin bahwa hasil estimasi model regresi adalah valid dan dapat dipercaya. Homoskedastisitas memastikan bahwa estimasi parameter yang diperoleh dari model regresi adalah efisien dan tidak bias. Dalam konteks penelitian, jika homoskedastisitas tidak tercapai dan terdapat heteroskedastisitas, peneliti perlu menggunakan metode alternatif atau koreksi, seperti menggunakan model regresi dengan estimasi robust standard errors, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Model regresi yang berkualitas tinggi adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memenuhi asumsi dasar dari metode OLS (Ordinary Least Squares), yang berarti bahwa varians kesalahan adalah konstan. Hal ini penting karena keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak efisien, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi interpretasi dan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi heteroskedastisitas adalah langkah krusial dalam proses analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan benar-benar mewakili data dan memberikan hasil yang dapat diandalkan.



Grafik *scatterplot* pada gambar di atas memperlihatkan bahwa fokus tersebut secara sembarang dan tersebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk contoh spesifik yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

UJI REGRESI BERGANDA

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.896 ^a	.804	.787	1939.805	

a. Predictors: (Constant), B. PEGAWAI, B. MODAL.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 369745112.0	2	184872556.0	49.131	.000 ^b
	Residual 90308283.97	24	3762845.165		
	Total 460053396.0	26			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), B. PEGAWAI, B. MODAL.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) -2267.333	982.434		-2.308	.030
	B. MODAL 2.218	.412	.810	5.381	.000
	B. PEGAWAI .159	.227	.105	.698	.492

a. Dependent Variable: PAD

Hasil uji t

Pada (X1) Belanja Modal menunjukkan hasil 0,000 dimana pada $X_1 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y.

Pada (X2) Belanja Pegawai menunjukkan hasil 0,492 dimana pada $X_2 < 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y.

Hasil uji f

Bila nilai sig pada anova $< 0,05$ maka nilai sig tersebut menunjukkan konsekuensi sebesar 0,000, maka pada saat itu terdapat pengaruh faktor X1 dan X2 terhadap faktor Y.

Apabila nilai sig anova lebih besar dari 0,05 dan nilai f sebesar 49,131, maka baik variabel X1 maupun X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Jadi cenderung beralasan bahwa keduanya sekaligus dan sampai batas tertentu merupakan faktor X1 Konsumsi Modal dan Gaji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor investasi modal dan belanja pegawai mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap pendapatan asli daerah, menurut temuan studi dan analisis. Selain itu, temuan analisis koefisien korelasi juga memperjelas adanya hubungan yang kuat antara variabel terikat dengan masing-masing variabel bebas yang digunakan.

DAFTAR REFERENSI

- Ariadi, W., dan Surjandari, R. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua. *Jurnal JENDELA*, 8 (1)
- Annisa,Trianingsuh (2010), Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi daerah Tahun 2008- 2009". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Burhanuddin, Ahmad. (2012). Pengaruh Belanja Pegawai, Pinjaman Daerah dan Investasi Pemerintah terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analisys Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Darwis, T.R.E. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi

- Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Halim, Abdul (2004), Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kawatu, S.F. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Sleman: DEEPUBLISH.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga.Jakarta.
- Mardiasmo (2002), Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No. 4 Juni 2002. Jakarta.
- Nugroho, Fajar. 2012 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Agus Samekto (2011) Dampak desentralisasi Anggaran terhadap Kinerja pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riki. (2017). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Ryanda Saputra (2014). Pengaruh Belanja Belanja Modal Terhadap PAD dan Dampaknya pada kinerja keuangan (studi empiris Pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- Sumarmi. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Tolosang, D.K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 18. No. 03
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Vera Felicia (2020), Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai, Leverage dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.